

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

Laporan TPID Kabupaten Tasikmalaya Triwulan II 2026

1. Perkembangan Harga Kebutuhan Pokok Masyarakat di Kabupaten Tasikmalaya bulan April 2026 dibanding dengan bulan Maret 2026 :

- Dari total 45 (empat puluh lima) komoditas Kebutuhan Pokok Masyarakat, tercatat ada 10 (sepuluh) komoditas kebutuhan pokok masyarakat mengalami kenaikan harga, 14 (empat belas) komoditas mengalami penurunan harga, serta 21 (dua puluh satu) komoditas tidak mengalami perubahan harga.
- Kebutuhan pokok masyarakat yang mengalami kenaikan harga diantaranya yaitu komoditas jeruk sebesar Rp.5.600 atau 26,17%; buncis sebesar Rp.1.800 atau 16,67%; ikan kembung segar sebesar Rp.2.000 atau 5,00%; cabai rawit hijau sebesar Rp.2.400 atau 4,40%; kacang tanah sebesar Rp.1.000 atau 2,81%; dan minyak goreng kemasan sederhana sebesar Rp.500 atau 2,79%;.
- Sedangkan kebutuhan pokok masyarakat yang mengalami penurunan harga diantaranya yaitu komoditas cabai rawit merah sebesar Rp.15.000 atau 18,07%; cabai merah biasa sebesar Rp.12.000 atau 18,02%; cabai hijau biasa terigu Segitiga Biru sebesar Rp.6.200 atau 16,58%; daging ayam broiler sebesar Rp.4.800 atau 11,82%; wortel sebesar Rp.1.400 atau 9,72; kol sebesar Rp.800 atau 8,33% dan bawang putih sebesar Rp.3.000 atau 7,69%.
- Adapun komoditas kebutuhan pokok masyarakat yang tidak mengalami perubahan/tetap diantaranya adalah Beras medium, beras premium, Minyak Goreng Bimoli, jagung tingkat peternak, dan kelapa.

2. Perkembangan Harga Kebutuhan Pokok Masyarakat di Kabupaten Tasikmalaya Bulan Mei 2026 dibanding dengan bulan April 2026:

- Perkembangan Harga Kebutuhan Pokok Masyarakat di Kabupaten Tasikmalaya bulan Mei 2026 dibanding dengan bulan April 2025 :
- Dari total 45 (empat puluh lima) komoditas Kebutuhan Pokok Masyarakat, tercatat ada 7 (tujuh) komoditas kebutuhan pokok masyarakat mengalami kenaikan harga, 8 (delapan) komoditas mengalami penurunan harga, serta 30 (tiga puluh) komoditas tidak mengalami perubahan harga.
- Kebutuhan pokok masyarakat yang mengalami kenaikan harga diantaranya yaitu komoditas cabai merah biasa sebesar Rp.5.400 atau 8,71%; cabai rawit merah sebesar Rp.3.400 atau 4,86%; cabai hijau biasa sebesar Rp.1.000 atau 3,45%; buncis sebesar Rp.400 atau 3,08%; kacang hijau sebesar Rp.400 atau 1,47%.
- Sedangkan kebutuhan pokok masyarakat yang mengalami penurunan harga diantaranya yaitu komoditas kol sebesar Rp.800 atau 9,76%; telur ayam ras sebesar Rp.2.100 atau 7,14%; wortel sebesar Rp.800 atau 5,80%; tepung terigu cap Segi Tiga Biru sebesar Rp.600 atau 5,26%; daging ayam kampung sebesar Rp.2.400 atau 3,93%.
- Adapun komoditas kebutuhan pokok masyarakat yang tidak mengalami perubahan/tetap diantaranya adalah Beras medium, beras premium, Minyak Goreng Bimoli, jagung tingkat peternak, dan kelapa.

3. Perkembangan Harga Kebutuhan Pokok Masyarakat di Kabupaten Tasikmalaya pada Bulan

Juni 2026, dimana harga komoditas pada bulan Juni 2026 dibanding dengan Mei 2026 :

- Dari total 45 (empat puluh lima) komoditas Kebutuhan Pokok Masyarakat, tercatat ada 10 (sepuluh) komoditas kebutuhan pokok masyarakat mengalami kenaikan harga, 8 (delapan) komoditas mengalami penurunan harga, serta 27 (dua puluh tujuh) komoditas tidak mengalami perubahan harga.
- Kebutuhan pokok masyarakat yang mengalami kenaikan harga diantaranya yaitu komoditas bawang merah sebesar Rp.6.200 atau 16,94%; cabai hijau biasa sebesar Rp.3.000 atau 10,00%; minyak goreng curah sebesar Rp.1.000 atau 5,03%; bawang putih sebesar Rp.1.600 atau 4,44%; cabai merah biasa sebesar Rp.2.600 atau 3,86%, daging sapi sebesar Rp.2.000 atau 1,47% dan telur ayam ras sebesar Rp.900 atau 3,30.
- Sedangkan kebutuhan pokok masyarakat yang mengalami penurunan harga diantaranya yaitu komoditas buncis sebesar Rp.3.800 atau 28,36%; kacang tanah sebesar Rp.4.000 atau 11,36%; daging ayam kampung sebesar Rp.2.600 atau 4,41%; daging ayam broiler sebesar Rp.1.200 atau 3,26%; pisang sebesar Rp.200 atau 2,53%.
- Adapun komoditas kebutuhan pokok masyarakat yang tidak mengalami perubahan/tetap diantaranya adalah Beras medium, beras premium, Minyak Goreng Bimoli, jagung tingkat peternak, dan kelapa

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di Kabupaten Tasikmalaya pada Triwulan II Tahun 2026 adalah dengan melakukan identifikasi penyebab perubahan harga, diantaranya :

1. Minyak Goreng MINYAKITA

Harga minyak goreng KITA masih berada di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) karena pasokan dari BULOG dan IdFood belum optimal, sehingga harga di tingkat pengecer naik.

Risiko kedepannya :

- Berkurangnya keterjangkauan harga minyak goreng bagi rumah tangga berpendapatan rendah.
- Meningkatnya beban biaya produksi bagi pelaku UMKM kuliner yang menggunakan minyak goreng sebagai bahan utama.
- Potensi kelangkaan di tingkat pengecer akibat keterlambatan pasokan.
- Kesenjangan harga antar wilayah yang dapat mengganggu stabilitas pasar lokal.

2. Cabai Besar dan Cabai Rawit

Analisis Penyebab Peningkatan Harga Cabai Besar dan Cabai Rawit di Kabupaten Tasikmalaya

- **Gangguan produksi akibat cuaca** seperti curah hujan tinggi maupun potensi kekeringan/El Niño menyebabkan penurunan produktivitas, serangan hama dan penyakit, serta mundurnya masa panen sehingga pasokan berkurang.
- **Pasokan yang terbatas** dari sentra produksi, sementara permintaan tetap tinggi, menyebabkan harga cabai mudah berfluktuasi.
- **Distribusi yang kurang lancar** dan meningkatnya biaya logistik dapat mengurangi pasokan di pasar Kabupaten Tasikmalaya sehingga mendorong kenaikan harga.

Risiko ke Depan :

Cabai besar dan cabai rawit berpotensi menjadi **penyumbang utama inflasi pangan** daerah karena volatilitas harganya tinggi.

- Penurunan produksi akibat cuaca ekstrem dapat memperlebar kesenjangan pasokan dan permintaan sehingga lonjakan harga semakin tajam.
- Tingginya ketergantungan pada pasokan dari luar daerah meningkatkan risiko apabila terjadi gangguan distribusi.
- Daya beli masyarakat dapat menurun dan memicu kenaikan harga komoditas pangan lain yang menggunakan cabai sebagai bahan baku.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Pelaksanaan Kebijakan Pengendalian Inflasi Kabupaten Tasikmalaya pada Triwulan II 2026 adalah sebagai berikut :

A. Keterjangkauan Harga

1. Melaksanakan Kegiatan Gerakan Pangan Murah (GPM) pada tanggal 22 Mei 2026 bertempat di Desa Deudeul Taraju Kabupaten Tasikmalaya. Kegiatan ini dilaksanakan bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Komoditas yang disalurkan diantaranya beras medium, beras premium, bawang merah, bawang putih, cabai merah keriting, cabai rawi merah, daging ayam ras, gula pasir, minyakita, minyak goreng, tepung terigu, bonteng, tomat, teluar cabai merah besar dan cabai rawit merah. Jumlah vendor 3 (tiga) Bulog, KWT Desa Deudeul, dan Peternak.
2. Melaksanakan Kegiatan Gerakan Pangan Murah (GPM) pada tanggal 27 Juni 2026 bertempat di Lapangan Upacara Kabupaten Tasikmalaya. Dilaksanakan pada kegiatan Pesta Patok Kabupaten Tasikmalaya. Kegiatan ini dilaksanakan bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Komoditas yang disalurkan diantaranya beras medium, beras premium, bawang merah, bawang putih, cabai merah keriting, cabai rawi merah, daging ayam ras, gula pasir, minyakita, minyak goreng, tepung terigu, bonteng, tomat, teluar cabai merah besar dan cabai rawit merah. Jumlah vendor 3 (tiga) Bulog, KWT, dan Peternak
3. Melaksanakan Kegiatan koordinasi dengan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat berkenaan dengan kegiatan Gelar Pangan Murah (GPM).

B. Ketersediaan Pasokan

2. Optimalisasi Program AgriTASIK (Agribisnis Tanaman Sayur Idaman Keluarga) dengan melibatkan Kelompok Wanita Tani (KWT).
3. Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) sebanyak 21,43 ton
4. Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan sebanyak 1 ton.
5. Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih sebanyak 1 ton
6. Kegiatan Pengadaan Hijauan Pakan Ternak sebanyak 10 ton.
7. Kegiatan Pengadaan bibit ternak sebanyak 835 ekor
8. Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian khusus untuk pengembangan Pertanian Organik seluas 500 ha.
9. Pembangunan Dam Parit : 1 unit

Pembangunan Jalan Usaha Tani : 6 unit

- 10.
11. Pembangunan Embung : 1 unit
12. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya 29 Unit (Pembangunan *Corporation Acces Farm Road*, Pembangunan Corporation of Collection Centres, Pembangunan Machinery sheds - equipment, Pembangunan Sarana Prasarana Utilitas Corporation, Pengadaan benih, pupuk dan pestisida, Pengadaan Hand Traktor, Pengadaan Paddy Mower, Pengadaan Pick up Car, Pengadaan Power Sprayer, Pengadaan Power Thresher, Pengadaan Power Weeder, Pengadaan Rice Milling Plant Center, Pengadaan Transplanter, Pengadaan Truck dll).
13. Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan : 1 unit
14. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani : 2 unit
15. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya 3 Unit.
16. Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak 1 kegiatan
17. Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis : 1 kegiatan
18. Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan : 100 ha
19. Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner : 39 kecamatan
20. Pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan pertanian di kecamatan dan desa : 39 kecamatan
21. Pelaksanaan kegiatan pengembangan kapasitas kelembagaan petani di kecamatan dan desa : 10 kecamatan
22. Melaksanakan program & kegiatan pengendalian inflasi daerah berkaitan dengan peningkatan produksi pertanian dan perikanan di Kabupaten Tasikmalaya diantaranya :
 - Pelaksanaan persiapan kegiatan Program pengelolaan sumber daya air (SDA).
 - Kegiatan optimalisasi produksi pangan melalui kegiatan UPLAND Project.
 - Penyampaian usulan calon penerima dan calon lokasi (CPCL) bantuan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

C. . Kelancaran Distribusi

3. Melaksanakan persiapan pelaksanaan kegiatan Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan. (Kegiatan Relokasi pasar Manonjaya, Revitalisasi pasar taraju, pemeliharaan sarana Distribusi perdagangan) : 1 kegiatan
4. Melaksanakan program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri : 1 kegiatan
5. Melaksanakan Program Pengembangan UMKM : 1 kegiatan digitalisasi UMKM
6. Melaksanakan program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan : 1 kegiatan
7. Melaksanakan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan sebagai prasarana distribusi barang dan jasa : 1 kegiatan.

D. Komunikasi Efektif

4. Rapat Koordinasi dan *Capacity Building* Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) :
 - HLM TPID Kabupaten Tasikmalaya dan dirangkaikan dengan Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri pada tanggal 6 April
 - Bimbingan Teknis Petugas Pelaksana Bantuan Pangan di Kabupaten Tasikmalaya oleh BULOG Kantor Cabang Ciamis pada tanggal 10 April 2026.

- HLM dan Capacity Building TPID Kabupaten Tasikmalaya “Diseminasi Exit Strategi Proyek Upland Tahun 2026” dilaksanakan pada tanggal 11 April 2026
- HLM TPID Kabupaten Tasikmalaya dan dirangkaikan dengan Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Jawa Barat yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri pada tanggal 13 April 2026
 - HLM TPID Kabupaten Tasikmalaya dan dirangkaikan dengan Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri pada tanggal 20 April
 - HLM TPID Kabupaten Tasikmalaya dan dirangkaikan dengan Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Jawa Barat yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri pada tanggal 27 April
 - HLM TPID Kabupaten Tasikmalaya “Temu Strategis Bupati Tasikmalaya bersama Forum KWT Agri Tasik Kabupaten Tasikmalaya pada tanggal 30 April 2026 bertempat di Islamic Center Kabupaten Tasikmalaya.
 - HLM TPID Kabupaten Tasikmalaya dan dirangkaikan dengan Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri pada tanggal 5 Mei 2026.
 - HLM TPID Kabupaten Tasikmalaya dan dirangkaikan dengan Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri oleh BULOG Kantor Cabang Ciamis pada tanggal 11 Mei 2026.
 - HLM TPID Kabupaten Tasikmalaya dan dirangkaikan dengan Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri pada tanggal 18 Mei
 - HLM TPID Kabupaten Tasikmalaya dan dirangkaikan dengan Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri pada tanggal 25 Mei 2026.
 - HLM TPID Kabupaten Tasikmalaya dan dirangkaikan dengan Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri pada tanggal 8 Juni 2026, Kegiatan dipimpin langsung oleh Bapak Wakil Bupati Tasikmalaya dan dihadiri oleh anggota TPID Kabupaten Tasikmalaya.
 - Rapat Koordinasi TPID Kabupaten Tasikmalaya dan dirangkaikan dengan Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri 15 uni 2026, kegiatan dipimpin oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Tasikmalaya.
 - Rapat Koordidnasi TPID Kabupaten Tasikmalaya dan dirangkaikan dengan Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri pada tanggal 22 Juni 2026, kegiatan dipimpin oleh Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan.
 - HLM TPID Kabupaten Tasikmalaya dan dirangkaikan dengan Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri pada tanggal 29 Juni 2026, Kegiatan dipimpin langsung oleh Bapak Wakil Bupati Tasikmalaya dan dihadiri oleh anggota TPID Kabupaten Tasikmalaya.
 - HLM TPID Kabupaten Tasikmalaya dengan tema “Exit Strategy Upland Area Kabupaten Tasikmalaya, pada tanggal 29 Juni 2026 dipimpin langsung oleh Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Tasikmalaya dan seluruh anggota TPID
1. Melaksanakan Pemantauan harga dan ketersediaan pasokan, kegiatan pendataan informasi harga dan pasokan rutin dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya, secara berkala setiap hari berdasarkan laporan dari UPT Pasar Taraju, Pasar Singaparna, Pasar Ciawi dan Pasar Manonjaya.
 2. Melaksanakan Pemantauan harga dan ketersediaan pasokan. kegiatan pendataan
 -

informasi harga dan pasokan rutin dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya, secara berkala setiap hari berdasarkan laporan dari UPT Pasar Taraju, Pasar Singaparna, Pasar Ciawi dan Pasar Manonjaya.

3. Menyusun Neraca Pangan/Prognosa Ketersediaan dan Kebutuhan Bahan Kebutuhan Pokok Masyarakat Kabupaten Tasikmalaya setiap minggu.
4. *Updating* informasi harga kebutuhan pokok masyarakat pada sistem informasi pengendalian inflasi Provinsi Jawa Barat. (<http://www.silinda.jabarprov.go.id>).
5. Percepatan dan optimalisasi berbagai kegiatan pengendalian inflasi sesuai dengan program pengendalian inflasi daerah.
6. Capacity Building TPID Kabupaten Tasikmalaya :
 1. Mengikuti *Capacity Building* TPID Provinsi Jawa Barat ke Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Solo pada tanggal 3 - 6 Juni 2026
 2. Capacity Building : Focus Group Discussion (FGD) Pengembangan Budidaya Cabai di Kecamatan Bojongsambirk pada tanggal 10 Juni 2026
 3. Capacity Building : Focus Group Discussion (FGD) Exit Strategy Upland Project Kabupaten Tasikmalaya.
7. Membuat Surat Edaran dalam upaya pengendalian inflasi daerah.
8. Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor : 0027 Tahun 2026 tentang Pengendalian Inflasi Daerah

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pengendalian inflasi selama Triwulan II Tahun 2026, terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian dalam upaya pengendalian inflasi di Kabupaten Tasikmalaya ke depan, antara lain:

1. **Terbatasnya pasokan minyak goreng MinyakKITA**

Belum optimalnya pasokan dari BULOG Kantor Cabang Ciamis. Kondisi ini menyebabkan pasokan ke tingkat pedagang pasar menjadi terbatas dan harga mengalami peningkatan. Pedagang terpaksa memperoleh pasokan dari wilayah lain dengan harga lebih tinggi, yang berdampak pada kenaikan harga di tingkat konsumen.

2. **Struktur rantai distribusi beberapa bahan kebutuhan pokok belum efisien**

Struktur distribusi sejumlah bahan kebutuhan pokok, seperti beras, cabai, daging sapi dan minyak goreng, masih panjang dan melibatkan banyak perantara. Ketidakefisienan ini berimplikasi pada meningkatnya biaya distribusi dan disparitas harga antar wilayah, khususnya antara daerah produsen dan daerah konsumen.

3. **Produksi komoditas pangan masih dipengaruhi pada musim**

Produksi komoditas hortikultura seperti cabai besar, cabai rawit, dan bawang merah masih sangat dipengaruhi oleh faktor cuaca dan musim tanam. Ketika terjadi anomali cuaca, seperti curah hujan tinggi, hasil panen menurun dan pasokan ke pasar berkurang sehingga harga melonjak tajam.

4. **Masih tingginya fluktuasi harga bahan makanan strategis**

Komoditas seperti cabai, bawang merah, bawang putih, dan telur ayam ras masih menunjukkan volatilitas harga yang tinggi. Fluktuasi ini disebabkan oleh faktor pasokan

yang tidak stabil, gangguan distribusi, serta keterlambatan informasi harga antar wilayah.

5. Ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah dan impor

Kabupaten Tasikmalaya masih bergantung pada pasokan dari daerah lain untuk memenuhi kebutuhan beberapa komoditas pokok seperti kedelai, bawang putih, dan gula pasir. Ketergantungan ini meningkatkan risiko tekanan inflasi ketika terjadi gangguan pasokan nasional maupun kenaikan harga di tingkat global.

6. Belum optimalnya pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM)

Pelaksanaan kegiatan GPM dan pasar murah masih belum menjangkau seluruh wilayah potensial, terutama kecamatan dengan tingkat kerentanan inflasi yang tinggi. Keterbatasan dukungan logistik dan koordinasi lintas perangkat daerah menjadi kendala dalam pemerataan pelaksanaan kegiatan tersebut.

7. Pemanfaatan data harga dan pasokan belum maksimal

Mekanisme pengumpulan dan analisis data harga di pasar masih memerlukan penguatan, baik dari sisi frekuensi pemantauan maupun pemanfaatannya dalam pengambilan kebijakan. Belum optimalnya integrasi data dengan aplikasi seperti *Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP)* menyebabkan keterlambatan respon terhadap potensi gejolak harga.

8. Koordinasi lintas sektor dan peran aktif stakeholder perlu ditingkatkan

Meskipun koordinasi TPID telah berjalan baik, sinergi lintas sektor antara perangkat daerah, BUMD, Bulog, dan pelaku usaha masih dapat ditingkatkan terutama dalam aspek distribusi, stabilisasi stok, dan informasi harga. Dukungan komunikasi publik untuk pengendalian ekspektasi harga juga masih terbatas.

9. Keterbatasan sarana penyimpanan dan pengolahan pascapanen

Sebagian petani dan pelaku usaha kecil belum memiliki fasilitas penyimpanan dan pengeringan hasil pertanian yang memadai, sehingga produk cepat rusak dan menyebabkan fluktuasi pasokan. Hal ini berpengaruh terhadap kestabilan harga di pasar, terutama pada periode non-panen.

10. Belum optimalnya peran BUMDes dan pelaku UMKM dalam distribusi pangan lokal.

Keterlibatan BUMDes dan UMKM sebagai pelaku distribusi pangan strategis masih terbatas. Padahal, penguatan peran mereka berpotensi memperpendek rantai distribusi dan menekan disparitas harga antar wilayah di Kabupaten Tasikmalaya

11. Masih tingginya disparitas harga antar waktu dan wilayah

Disparitas harga antar waktu dan wilayah masih relatif tinggi karena perbedaan ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, biaya logistik, serta pengaruh musim dan kondisi cuaca. Akibatnya, harga komoditas pangan di setiap daerah dan periode dapat berbeda cukup signifikan sehingga berpotensi meningkatkan volatilitas harga dan menekan daya beli masyarakat

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi Kabupaten Tasikmalaya diantaranya:

Keterjangkauan Harga

1.

Kebijakan untuk menjaga keterjangkauan harga bagi masyarakat dilakukan melalui langkah-langkah berikut:

1. **Pelaksanaan Operasi Pasar Murah (OPM) dan Gerakan Pangan Murah (GPM)** secara berkala di wilayah dengan tingkat kerentanan inflasi yang tinggi, terutama menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).

Pengampu: DKPP bekerja sama dengan Perum BULOG, Diskopukmperindag, dan kecamatan.

1. **Stabilisasi harga komoditas strategis** seperti beras, cabai, dan minyak goreng melalui operasi pasar dan intervensi stok di titik-titik rawan kenaikan harga.

Pengampu: DKPP, Diskopukmperindag, dan BULOG.

1. **Pengembangan sistem informasi harga berbasis digital** agar masyarakat dapat mengakses harga acuan dan mencegah praktik spekulasi di pasar.

Pengampu: Dinas KUKM Indag, Diskominfo dan Bagian Perekonomian Setda.

1. **Optimalisasi penyaluran bantuan pangan** untuk konsumsi kebutuhan pokok masyarakat.

Pangampu : Dinas DPKPP, DKUKM INDAG, BULOG

1. **Optimalisasi penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP)** bekerjasama dengan Perum BULOG Kantor Cabang Ciamis.

2. **Ketersediaan Pasokan**

Dalam upaya peningkatan dan menjaga ketersediaan pasokan bahan kebutuhan pokok masyarakat di Kabupaten Tasikmalaya diperlukan beberapa upaya percepatan swasembada pangan diantaranya :

1. **Peningkatan kapasitas produksi dan diversifikasi pangan lokal**, terutama untuk komoditas strategis seperti beras, cabai, bawang merah, dan telur ayam ras. Program ini diarahkan untuk memperkuat ketahanan pangan daerah dan mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah.
 - Pengampu: Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (DKPP), Dinas Pertanian, dan Dinas Peternakan.
2. **Peningkatan sarana pascapanen**, seperti pengeringan gabah, rumah cabai, gudang pendingin, dan fasilitas penyimpanan pangan, agar ketersediaan stok lebih terjaga sepanjang tahun.
 - Pengampu: Dinas Pertanian dan DKPP dengan dukungan Dinas Perindustrian.
3. **Optimalisasi peran BUMD dan BUMDes dalam menjaga ketersediaan stok pangan daerah**, melalui penyaluran bahan pokok strategis secara langsung ke masyarakat.
 - Pengampu: Bagian Perekonomian Setda, BUMD PT ABYAKTA DARMA YASA, dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD).

Peningkatan akses keuangan untuk sektor pertanian dan perikanan melalui peningkatan inklusi dan literasi keuangan.

- Pengampu : Bagian Perekonomian Setda, BUMD Keuangan, OJK dan Bank Indonesia
- 1. **Peningkatan cadangan pangan pemerintah daerah (CPPD)** sebagai instrumen stabilisasi pasokan dalam menghadapi periode rawan pangan dan fluktuasi harga. (Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, Dinas Pertanian)
- 2. **Optimalisasi Dana Desa** untuk kegiatan pertanian dan ketahanan pangan masyarakat, seperti pengembangan lumbung pangan desa, pemberdayaan kelompok tani, serta fasilitasi alat dan sarana produksi pertanian. (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Pertanian).
- 3. **Penguatan Kerja Sama Antar Daerah (KAD)** dalam bentuk perdagangan antarwilayah untuk mengamankan pasokan dari daerah surplus ke daerah defisit. (Bagian Perekonomian, Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan)
- 4. **Optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan rumah** untuk kegiatan pertanian dengan melaksanakan himbuan kepada masyarakat dalam pemanfaatan lahan pekarangan dan lahan tidur untuk kegiatan pertanian dengan menanam tanaman cepat panen (misal : cabe, bawang, tomat, dll) dalam upaya mencukupi ketersediaan pangan rumah tangga (Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Pertanian, PKK, Forum KWT Kab. Tasikmalaya).

3. Kelancaran Distribusi

Kelancaran arus distribusi menjadi kunci penting dalam menjaga kestabilan pasokan dan harga. Upaya yang direkomendasikan meliputi:

1. **Optimalisasi Penyaluran komoditas minyak goreng KITA** di Kabupaten Tasikmalaya guna memperpendek rantai distribusi dan mengurangi disparitas harga antarwilayah.
 - **Pengampu:** Diskopukmperindag bekerja sama dengan BULOG dan distributor utama.
2. **Peningkatan efisiensi rantai distribusi bahan kebutuhan pokok** dengan mendorong peran Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), BUMDesa dan pelaku UMKM sebagai distributor lokal.
 - **Pengampu:** Diskopukmperindag dan DPMD.
3. **Koordinasi lintas sektor antara TPID, Satgas Pangan, BULOG, dan pelaku usaha logistik** untuk mengatasi hambatan distribusi dan mempercepat aliran barang di lapangan.
 - **Pengampu:** Bagian Perekonomian Setda dan Polres/Satgas Pangan.
4. **Optimalisasi program kemitraan** antara petani, BUMP, UKM dengan pasar modern (Dinas KUKM Indag).
5. Peningkatan kegiatan **Agri Store** dan **PASAR TANI** baik melalui Operasi Pasar Murah (OPM), Gerkan Pangan Murah (GPM) atau Bazar/Pameran UMKM/Pertanian terutama menghadapi HBKN (DPKPP dan DKUKM Indag).
6. **Optimalisasi penyaluran Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP)** Beras dengan meningkatkan jumlah distributor dan penyalur di seluruh kecamatan serta meningkatkan pelaksanaan pengawasan, monitoring dan evaluasi atas penyaluran SPHP Beras di Kabupaten Tasikmalaya (DPKPP dan DKUKM Indag).
- 4.

4. Komunikasi Efektif

Kebijakan pengendalian inflasi perlu disertai dengan komunikasi publik yang efektif agar masyarakat memiliki persepsi yang tepat terhadap kondisi harga dan ketersediaan barang. Langkah-langkah yang perlu dilakukan meliputi:

1. **Meningkatkan intensitas pemantauan ketersediaan dan harga** komoditas secara berkala setiap hari dari UPT Pasar Taraju, Pasar Singaparna, Pasar Ciawi, Pasar Cikatomas dan Pasar Manonjaya. (Dinas KUKM Indag, dan Bagian Perekonomian, Sekretariat Daerah)
2. **Peningkatan publikasi data harga harian** dan kondisi pasokan bahan pokok melalui kanal resmi pemerintah daerah. (Dinas KUKM Indag, Dinas Komunikasi dan Informatika, Bagian Perekonomian)
3. **Edukasi masyarakat terkait perilaku konsumsi bijak dan anti *panic buying***, terutama pada saat harga komoditas mengalami lonjakan. (TPID Kabupaten Tasikmalaya, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan)
4. **Koordinasi dan diseminasi informasi** secara rutin melalui *High Level Meeting (HLM) dan Capacity Building* TPID untuk memastikan kesamaan langkah antarperangkat daerah. (Bagian Perekonomian, Sekretariat Daerah).
5. **Menyusun Surat Edaran himbauan** untuk optimalisasi penyaluran Beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di Kabupaten Tasikmalaya (Bagian Perekonomian, Sekretariat Daerah).
6. **Melaksanakan penguatan koordinasi dengan berbagai stakeholder** dalam menjaga stabilitas harga dan pasokan kebutuhan pokok, diantaranya koordinasi dengan BULOG Kantor Cabang Ciamis dalam Penyaluran Bantuan Pangan, SPHP Beras serta Minyak Goreng Kita. (Dinas KUKM Indag, dan Bagian Perekonomian, Sekretariat Daerah).